



## Mengungkap Penggelapan Dana Nasabah: Strategi Pencegahan dan Penanganan di Era Digital

Rusyiana, Widi Pandu Ardiyanto, Muhammad Khoirul Anam

Universitas Negeri Semarang

---

### Abstrak

Received: 20 Mei 2025  
Revised: 27 Mei 2025  
Accepted: 01 Juni 2025

*Dalam konteks kejahatan perbankan digital yang semakin marak, artikel ini membahas penggelapan dana nasabah. Fokus utama adalah pada metode penanganan dan pencegahan yang diperlukan untuk melindungi pelanggan. Dalam era digital saat ini, sangat penting bagi masyarakat untuk menjadi lebih cermat tentang keuangan dan mendapatkan edukasi tentang bahaya penipuan. Selain itu, penelitian ini mengkaji bagaimana lembaga pemerintah dan sektor swasta dapat bekerja sama untuk membuat sistem keamanan yang baik, serta betapa pentingnya teknologi untuk mendeteksi dan menangani kejahatan perbankan. Hasil menunjukkan bahwa tindakan proaktif dapat mengurangi efek yang merugikan bagi konsumen dan institusi keuangan.*

**Kata Kunci:** *Penggelapan, Pencegahan, Keamanan.*

(\*) Corresponding Author:

[rusyianarusyi@students.unnes.ac.id](mailto:rusyianarusyi@students.unnes.ac.id)

[widipandu1412@students.unnes.ac.id](mailto:widipandu1412@students.unnes.ac.id)

[muhammadkhoirulanam@students.unnes.ac.id](mailto:muhammadkhoirulanam@students.unnes.ac.id)

**How to Cite:** Rusyiana, R., Ardiyanto, W., & Anam, M. (2025). Mengungkap Penggelapan Dana Nasabah: Strategi Pencegahan dan Penanganan di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(6.B), 169-181. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10637>

---

## PENDAHULUAN

Sektor keuangan menghadapi tantangan baru dan kompleks di era digital yang semakin berkembang, salah satunya adalah penggelapan dana nasabah. Kasus penggelapan ini dapat berdampak buruk pada reputasi lembaga keuangan dan kepercayaan publik selain merugikan individu. Dengan semakin banyaknya transaksi yang dilakukan secara online, ada kemungkinan lebih besar bahwa dana pelanggan tidak aman.

Penggelapan dana nasabah biasanya terjadi melalui penggunaan metode canggih yang memanfaatkan kelemahan sistem keamanan, serta ketidaksadaran nasabah terhadap praktik penipuan yang sudah ada. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan untuk membuat strategi pencegahan yang kuat untuk menangani penggelapan. Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan berbagai metode yang digunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan penggelapan dana, serta tindakan konkret yang dapat diambil oleh lembaga keuangan dan konsumen untuk mencegah dan menangani masalah ini.

Dengan memahami bagaimana penggelapan dana terjadi di era teknologi, setiap orang diharapkan dapat bekerja sama untuk membuat lingkungan keuangan yang lebih aman dan terpercaya. Mari kita telusuri lebih jauh tentang cara mencegah dan menangani penggelapan dana nasabah dalam konteks transformasi digital saat ini.

## KAJIAN TEORI

**Pentingnya Literasi Digital:** Pendidikan keamanan digital dapat mengurangi kerentanan terhadap penipuan. Hal ini tentunya menjadi tindakan pertama dalam mencegah terjadinya kejahatan perbankan.

**Strategi Pencegahan:** Kolaborasi antar lembaga pemerintah dalam penegakan hukum dan penggunaan teknologi keamanan canggih seperti firewall dan sistem deteksi intrusi sangat penting untuk mencegah penggelapan dana konsumen.

**Regulasi dan Penegakan Hukum:** Untuk menangani kejahatan transnasional yang semakin kompleks, aparat penegak hukum harus memiliki regulasi yang jelas dan tindakan tegas khususnya dalam bidang perbankan.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam artikel ini menggunakan metode studi pustaka untuk mengumpulkan data-data terkait. Metode ini melibatkan pengumpulan, dan analisis literatur yang relevan yang di dalamnya termasuk buku, jurnal, dan dokumen hukum terkait penggelapan nasabah. Dengan menggunakan cara ini memungkinkan penulis untuk mendapatkan wawasan, dan pengetahuan mengenai keamanan perbankan tanpa harus melakukan penelitian secara langsung, serta memberikan dasar teoritis yang kuat untuk rekomendasi kebijakan di masa depan.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Penyebab Utama dan Dampak Penggelapan Dana Nasabah terhadap Kepercayaan Publik di Sektor Perbankan**

Dalam industri perbankan, kepercayaan publik merupakan fondasi utama yang menentukan keberlangsungan dan kesuksesan lembaga keuangan. Namun, kasus penggelapan dana nasabah sering kali menjadi ancaman serius yang menggerus kepercayaan masyarakat terhadap bank. Tindakan penggelapan dana tidak hanya berdampak pada kerugian finansial yang dialami oleh nasabah, tetapi juga meninggalkan bekas emosional dan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap institusi keuangan. Terlebih dalam era digital, ketika layanan perbankan semakin bergantung pada teknologi, risiko kejahatan siber yang menargetkan lembaga keuangan dan nasabah terus meningkat.

Beberapa faktor mendasari terjadinya penggelapan dana nasabah, mulai dari kelemahan sistem keamanan, perkembangan teknologi penipuan yang semakin canggih, rendahnya literasi keuangan dan digital di kalangan nasabah, hingga lemahnya manajemen internal di perbankan. Selain itu, ketidaktegasan regulasi dan kurangnya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan perbankan juga turut berperan dalam meningkatkan risiko ini. Dampak dari penggelapan dana terhadap kepercayaan publik tidak bisa dianggap sepele. Kasus ini kerap kali memicu respons negatif dari nasabah, menurunkan reputasi bank, serta memengaruhi perilaku nasabah dalam menggunakan layanan perbankan.

#### **A. Penyebab Utama Terjadinya Penggelapan Dana Nasabah Di Sektor Perbankan**

Penggelapan dana nasabah di sektor perbankan menjadi salah satu isu yang cukup serius dan mendapatkan perhatian luas di berbagai belahan dunia. Tindakan ini tidak hanya merugikan nasabah secara finansial, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Dalam konteks era digital, ancaman terhadap keamanan perbankan semakin meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penggelapan dana nasabah serta bagaimana langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegahnya. Berikut ini adalah beberapa faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya penggelapan dana di sektor perbankan, serta rekomendasi untuk meningkatkan keamanan dan integritas lembaga keuangan.

##### **1. Kelemahan Sistem Keamanan**

Salah satu faktor utama yang menyebabkan penggelapan dana nasabah di sektor perbankan adalah kelemahan dalam sistem keamanan bank itu sendiri. Meskipun banyak bank telah mengimplementasikan teknologi keamanan canggih, seperti firewall, sistem

deteksi intrusi, dan enkripsi data, ancaman siber tetap ada dan terus berkembang. Serangan siber seperti phishing, malware, dan ransomware dirancang khusus untuk mencuri informasi sensitif dari nasabah, seperti nomor rekening, kata sandi, dan data pribadi lainnya. Pelaku kejahatan siber biasanya mencari celah sekecil apapun dalam sistem keamanan bank untuk bisa masuk dan melakukan aksinya. Selain itu, beberapa lembaga keuangan mungkin belum sepenuhnya menerapkan teknologi yang memadai atau tidak secara rutin melakukan pembaruan sistem keamanan mereka. Hal ini membuat mereka rentan terhadap serangan yang lebih baru dan canggih. Selain teknologi, faktor manusia juga berperan besar dalam keamanan. Kelalaian atau ketidaktahuan karyawan bank dalam menerapkan protokol keamanan bisa menjadi pintu masuk bagi pelaku kejahatan siber. Oleh karena itu, bank harus memastikan bahwa selain teknologi, pelatihan rutin untuk karyawan mengenai praktik keamanan siber juga harus menjadi prioritas.<sup>1</sup>

## 2. Perkembangan Teknologi dan Taktik Penipuan

Dalam era digital yang terus berkembang, metode penipuan juga mengalami kemajuan yang signifikan. Pelaku kejahatan siber semakin canggih dalam mengembangkan teknik-teknik yang dapat meniru perilaku transaksi sah dari nasabah. Hal ini membuat deteksi aktivitas mencurigakan menjadi lebih sulit bagi sistem perbankan. Contohnya, pelaku kejahatan menggunakan teknologi machine learning dan kecerdasan buatan untuk mempelajari pola transaksi nasabah. Dengan memanfaatkan data ini, mereka dapat membuat transaksi palsu yang tampak kredibel dan lolos dari pengawasan sistem deteksi penipuan. Selain itu, perkembangan teknologi juga memungkinkan pelaku kejahatan untuk melakukan serangan siber yang lebih terkoordinasi dan terarah. Mereka bisa menggunakan botnet untuk melancarkan serangan DDoS atau meretas sistem keamanan bank dalam skala besar. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan untuk terus memperbarui dan meningkatkan sistem keamanan mereka, serta mengadopsi teknologi yang dapat membantu mendeteksi dan mencegah penipuan dengan lebih efektif.<sup>2</sup>

## 3. Kurangnya Literasi Keuangan dan Digital

Literasi keuangan dan digital yang rendah di kalangan nasabah juga menjadi salah satu faktor utama terjadinya penggelapan dana. Banyak nasabah yang tidak menyadari risiko yang mereka hadapi ketika melakukan transaksi online. Mereka mungkin tidak tahu cara mengenali email phishing atau situs web palsu, sehingga mudah tertipu dan memberikan informasi sensitif kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang praktik keamanan digital yang baik, seperti penggunaan kata sandi yang kuat dan tidak membagikan informasi pribadi secara sembarangan, juga meningkatkan kerentanan nasabah terhadap penipuan. Untuk mengurangi risiko ini, edukasi tentang literasi keuangan dan digital sangat penting. Lembaga keuangan perlu melakukan kampanye edukasi kepada nasabah mereka mengenai cara melindungi diri dari penipuan, tanda-tanda email atau situs web yang mencurigakan, serta pentingnya menjaga kerahasiaan informasi pribadi. Dengan meningkatkan literasi keuangan dan digital, nasabah akan lebih waspada dan mampu melindungi diri mereka dari tindakan penipuan.<sup>3</sup>

## 4. Manajemen yang Buruk

Faktor lain yang berkontribusi terhadap penggelapan dana nasabah adalah manajemen internal yang buruk di lembaga keuangan. Ketika manajemen tidak memiliki sistem

---

<sup>1</sup> Hanae, A., Gahi, Y., & El Mendili, S. (2023). Analysis of banking fraud detection methods through machine learning strategies in the era of digital transactions. *Colloquium in Information Science*. <https://doi.org/10.1109/CiSt56084.2023.10409974>

<sup>2</sup> Hanae et al., 2023.

<sup>3</sup> Johri, A., & Kumar, S. (2023). Exploring customer awareness towards their cyber security in the Kingdom of Saudi Arabia: A study in the era of banking digital transformation. *Human Behavior and Emerging Technologies*. <https://doi.org/10.1155/2023/2103442>

pengawasan yang efektif terhadap transaksi dan karyawan, hal ini menciptakan celah bagi terjadinya penyalahgunaan wewenang. Dalam beberapa kasus, pegawai bank sendiri terlibat dalam tindakan penggelapan dana. Mereka memanfaatkan akses mereka terhadap sistem perbankan untuk melakukan transaksi yang tidak sah dan mengalihkan dana nasabah ke rekening pribadi mereka. Selain itu, kurangnya pengawasan yang ketat juga memungkinkan terjadinya kolusi antara karyawan dan pihak luar. Untuk mengatasi masalah ini, lembaga keuangan perlu memperkuat manajemen internal mereka. Ini termasuk menerapkan sistem pengawasan yang ketat terhadap semua transaksi, melakukan audit secara berkala, serta memastikan adanya mekanisme pelaporan yang transparan. Selain itu, penting juga untuk memiliki kebijakan yang jelas mengenai sanksi bagi karyawan yang terlibat dalam tindakan penggelapan dana, agar memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kasus serupa.<sup>4</sup>

#### 5. Regulasi dan Penegakan Hukum yang Lemah

Regulasi yang tidak memadai serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan perbankan menjadi salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap tingginya angka penggelapan dana. Tanpa adanya regulasi yang ketat dan sanksi yang tegas, pelaku kejahatan merasa lebih berani untuk melakukan tindakan penggelapan karena risikonya rendah. Mereka merasa bahwa peluang untuk ditangkap dan dihukum sangat kecil, sehingga tindakan mereka tidak terhalangi oleh rasa takut terhadap konsekuensi hukum. Selain itu, kurangnya koordinasi antara lembaga keuangan dan aparat penegak hukum juga menjadi hambatan dalam penanganan kasus penggelapan dana. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan regulasi yang lebih ketat dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku kejahatan perbankan. Pemerintah perlu bekerja sama dengan lembaga keuangan dalam mengembangkan regulasi yang efektif dan memastikan bahwa semua pihak mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, aparat penegak hukum perlu dilengkapi dengan pengetahuan dan sumber daya yang memadai untuk menangani kasus kejahatan siber di sektor perbankan dengan lebih efektif.<sup>5</sup>

#### 6. Sikap Perbankan terhadap Keamanan

Sikap lembaga keuangan terhadap keamanan juga memainkan peran penting dalam mencegah terjadinya penggelapan dana. Ketika bank tidak proaktif dalam menangani masalah keamanan, mereka menciptakan celah bagi pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Lembaga keuangan perlu menjadikan keamanan sebagai prioritas utama dalam operasi mereka. Ini termasuk tidak hanya mengadopsi teknologi keamanan terbaru, tetapi juga memastikan bahwa semua karyawan memahami pentingnya keamanan dan dilatih secara rutin mengenai praktik keamanan yang baik. Selain itu, bank juga harus bersikap transparan terhadap nasabah mengenai langkah-langkah keamanan yang mereka terapkan, sehingga nasabah merasa lebih aman dan percaya bahwa dana mereka terlindungi. Dengan sikap yang proaktif terhadap keamanan, lembaga keuangan dapat mencegah terjadinya penggelapan dana dan menjaga kepercayaan nasabah.<sup>6</sup>

Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penyebab utama penggelapan dana, lembaga keuangan dan nasabah dapat bekerja sama untuk mengembangkan strategi pencegahan yang lebih efektif. Langkah ini penting untuk melindungi dana nasabah dan menjaga integritas sistem perbankan di era digital yang penuh tantangan ini.

---

<sup>4</sup> Lestari, R. (2020). Analysis of quality of management accounting information system to improve the implementation of good corporate governance principles (Case of Sharia commercial banks in Bandung City). *Research Journal of Finance and Accounting*, 11(6), 10. <https://doi.org/10.7176/rjfa/11-6-10>

<sup>5</sup> Ochilov, K. (2021). The object and its significance in crimes of looting other's property by using computer tools. *Psychology and Education*, 58(1), 855. <https://doi.org/10.17762/PAE.V58I1.855>

<sup>6</sup> Reddy, N. M., & Karthik, N. (2024). A study of recent Indian banking sector issues and challenges in the digital era. *International Journal of Economics, Business, and Computer Science*. <https://doi.org/10.55248/gengpi.5.0824.2002>

## **B. Dampak Penggelapan Dana Nasabah Terhadap Kepercayaan Publik Terhadap Institusi Perbankan**

Penggelapan dana nasabah merupakan masalah yang sangat serius dan memiliki dampak yang mendalam terhadap kepercayaan publik terhadap institusi perbankan. Dalam era digital yang semakin canggih ini, di mana transaksi keuangan sangat bergantung pada teknologi, masalah penggelapan dana menjadi semakin signifikan. Kejadian penggelapan dana dapat mengakibatkan kerugian finansial dan emosional bagi nasabah, penurunan reputasi bank, perubahan perilaku nasabah, serta berdampak jangka panjang pada hubungan antara nasabah dan bank. Selain itu, insiden penggelapan dana juga sering kali memicu regulasi yang lebih ketat dari pihak pemerintah dan upaya yang lebih besar dari institusi perbankan untuk memulihkan kepercayaan publik. Selanjutnya penulis akan membahas secara menyeluruh dampak dari penggelapan dana nasabah terhadap kepercayaan publik terhadap institusi perbankan, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan memahami dampak-dampak ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk menjaga dan memulihkan kepercayaan nasabah terhadap institusi perbankan.

### **1. Kerugian Finansial dan Emosional bagi Nasabah**

Penggelapan dana nasabah tidak hanya menyebabkan kerugian finansial langsung bagi nasabah, tetapi juga membawa dampak emosional yang mendalam. Nasabah yang kehilangan uang mereka sering merasa dikhianati dan tidak aman, yang dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap lembaga keuangan secara keseluruhan. Ketika dana hilang atau tidak dapat diakses, nasabah kehilangan kepercayaan pada kemampuan bank untuk menjaga dan mengelola aset mereka dengan aman. Kasus terkenal seperti penggelapan dana nasabah Citibank oleh Malinda Dee, seorang Relationship Manager, menunjukkan betapa merusaknya dampak ini. Tindakan Malinda tidak hanya merugikan nasabah secara finansial, tetapi juga menciptakan ketidakpastian dan kegelisahan di antara nasabah lain mengenai keamanan dana mereka. Dampak ini sering kali meluas, di mana nasabah yang terkena dampak langsung menceritakan pengalaman negatif mereka kepada orang lain, menyebarkan ketidakpercayaan lebih lanjut dan merusak reputasi bank di mata publik.<sup>7</sup>

### **2. Penurunan Reputasi Institusi Perbankan**

Reputasi bank sangat bergantung pada tingkat kepercayaan yang diberikan oleh nasabah mereka. Ketika berita tentang penggelapan dana menyebar, publik cenderung melihat bank tersebut sebagai lembaga yang tidak dapat dipercaya. Media massa sering memberitakan kejadian-kejadian ini secara luas, memperburuk citra bank di mata publik. Reputasi yang buruk dapat menyebabkan penurunan jumlah nasabah baru dan mempengaruhi loyalitas nasabah yang sudah ada. Penelitian menunjukkan bahwa reputasi yang baik memainkan peran penting dalam keputusan nasabah untuk menggunakan produk dan layanan perbankan. Kasus-kasus penggelapan dana dapat menyebabkan penurunan jumlah nasabah baru yang mau membuka rekening atau menggunakan jasa bank tersebut, serta menyebabkan nasabah yang sudah ada untuk berpikir dua kali sebelum tetap menggunakan layanan bank tersebut. Bahkan, beberapa nasabah yang merasa tidak puas dengan respons bank terhadap insiden penggelapan dapat memilih untuk menarik dana mereka dan beralih ke bank lain.<sup>8</sup>

### **3. Perubahan Perilaku Nasabah dan Dampak Jangka Panjang pada Hubungan Nasabah-Bank**

---

<sup>7</sup> Andriani, S. (2012). Analisis isi pemberitaan kasus tindak kejahatan perbankan (Studi analisis isi berita kasus penggelapan dana nasabah Citibank periode Maret 2011-Maret 2012 di Metro TV). Engineering. Corpus ID: 107706738

<sup>8</sup> Sahrir, I. F., Paridah, N., Yunitasari, K., & Putri, R. A. A. (2024). Perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam penggunaan aplikasi Dana di Indonesia. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)*, 2(2). <https://doi.org/10.59435/jurdikum.v2i2.379>

Setelah mengalami atau mendengar tentang penggelapan dana, nasabah mungkin menjadi lebih skeptis terhadap transaksi digital dan layanan perbankan secara umum. Mereka mungkin akan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi, memilih untuk menggunakan metode pembayaran tradisional atau menghindari layanan perbankan online. Hal ini dapat menghambat adopsi teknologi digital dalam sektor keuangan, yang sebenarnya dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan. Kepercayaan adalah fondasi dari hubungan antara bank dan nasabah. Ketika penggelapan terjadi, hubungan ini terganggu secara signifikan. Nasabah mungkin akan lebih berhati-hati dalam bertransaksi atau bahkan memilih untuk beralih ke lembaga keuangan lain yang dianggap lebih aman. Ketidakpercayaan yang muncul dapat memicu nasabah untuk lebih sering memonitor rekening mereka atau meminta informasi lebih lanjut tentang langkah-langkah keamanan yang diterapkan oleh bank. Dalam jangka panjang, bank mungkin perlu menginvestasikan lebih banyak sumber daya untuk memulihkan kepercayaan dan memastikan nasabah bahwa dana mereka aman.<sup>9</sup>

#### 4. Regulasi yang Lebih Ketat dan Upaya Pemulihan Kepercayaan

Kejadian penggelapan dana sering kali memicu respons dari pemerintah dan regulator untuk memperketat regulasi di sektor perbankan. Meskipun ini dapat meningkatkan keamanan sistem perbankan, perubahan regulasi yang cepat juga dapat menciptakan ketidakpastian bagi lembaga keuangan dan nasabah. Bank harus beradaptasi dengan kebijakan baru, yang bisa mempengaruhi layanan dan produk yang mereka tawarkan. Untuk memulihkan kepercayaan publik, institusi perbankan perlu mengambil langkah-langkah proaktif. Ini termasuk peningkatan transparansi dalam operasi mereka, penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelaku kejahatan perbankan, serta penerapan teknologi keamanan canggih untuk melindungi data dan dana nasabah. Selain itu, lembaga penjamin simpanan juga berperan penting dalam memberikan jaminan kepada nasabah bahwa dana mereka aman. Bank juga dapat melakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran nasabah tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi dan bagaimana mengenali tanda-tanda penipuan.<sup>10</sup>

#### 5. Peningkatan Investasi dalam Keamanan

Institusi perbankan cenderung meningkatkan investasi dalam teknologi keamanan dan sistem deteksi penipuan setelah mengalami insiden penggelapan. Meskipun ini adalah langkah positif untuk melindungi nasabah di masa depan, biaya tambahan ini dapat berdampak pada profitabilitas bank dan pada akhirnya dapat mempengaruhi biaya layanan bagi nasabah. Bank mungkin perlu mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk memperbarui sistem keamanan mereka, mengembangkan algoritma deteksi penipuan yang lebih canggih, dan melatih karyawan untuk lebih waspada terhadap tanda-tanda penggelapan dana. Selain itu, bank juga harus memastikan bahwa semua lapisan keamanan ini tidak mengurangi kenyamanan nasabah dalam menggunakan layanan perbankan. Seiring dengan peningkatan investasi dalam keamanan, bank juga perlu memastikan bahwa mereka tetap dapat menyediakan layanan yang cepat, mudah diakses, dan user-friendly bagi nasabah.

Secara keseluruhan, penggelapan dana nasabah memiliki dampak yang luas dan kompleks terhadap kepercayaan publik terhadap institusi perbankan. Untuk menjaga dan memulihkan kepercayaan tersebut, bank harus berkomitmen untuk meningkatkan keamanan dan transparansi dalam setiap aspek operasional mereka. Selain itu, penting bagi lembaga keuangan untuk menerapkan strategi pencegahan yang efektif dan meningkatkan transparansi

---

<sup>9</sup> Guna, I. G. A. W., Sukandia, I. N., & Ujianti, N. M. P. (2022). Pertanggungjawaban pidana pengurus LPD yang melakukan penggelapan dana nasabah di LPD Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), 227-233. <https://doi.org/10.55637/jkh.3.2.4803.227-233>

<sup>10</sup> Yudhistira, F., Faniyah, I., & Fahmiron, F. (2022). Penyidikan tindak pidana perbankan dalam bentuk penggelapan dana nasabah kredit usaha rakyat pada PT. BRI Cabang Katib Sulaiman. *Unes Journal of Swara Justisia*, 5(4). <https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i4.235>

serta komunikasi dengan nasabah guna membangun kembali kepercayaan yang hilang. Penanganan yang tepat terhadap insiden penggelapan dana tidak hanya melibatkan langkah-langkah teknis, tetapi juga memerlukan pendekatan yang holistik yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam ekosistem keuangan.

## **2. Langkah Pencegahan dan Proses Penanganan Hukum terhadap Penggelapan Dana Nasabah di Indonesia**

Penggelapan dana nasabah merupakan salah satu bentuk kejahatan keuangan yang dapat mengancam stabilitas sistem perbankan dan merugikan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan. Di era digital yang semakin berkembang, risiko penggelapan dana menjadi lebih tinggi seiring dengan meningkatnya transaksi perbankan elektronik dan penggunaan teknologi informasi dalam operasional bank. Kasus penggelapan dana nasabah, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal, menunjukkan perlunya langkah-langkah pencegahan yang efektif dan proses penanganan hukum yang tegas.

Di Indonesia, upaya untuk mencegah penggelapan dana nasabah mencakup berbagai langkah yang dapat dilakukan oleh bank, seperti peningkatan literasi keuangan, penerapan teknologi keamanan, kepatuhan terhadap regulasi, serta kerja sama dengan pihak terkait. Langkah-langkah ini penting untuk menciptakan sistem keuangan yang aman dan melindungi nasabah dari potensi kerugian akibat kejahatan perbankan.

Namun, pencegahan saja tidak cukup. Ketika kasus penggelapan dana terjadi, diperlukan proses hukum yang jelas dan tegas untuk menangani pelaku, yang melibatkan tahapan investigasi, penuntutan, dan penerapan sanksi sesuai ketentuan hukum di Indonesia. Penanganan yang komprehensif ini diharapkan dapat memberikan efek jera, keadilan bagi korban, serta memperkuat perlindungan hukum bagi nasabah.

### **A. Langkah-Langkah Pencegahan Yang Dapat Diimplementasikan Oleh Bank Untuk Menghindari Penggelapan Dana Nasabah**

Dalam menghadapi ancaman penggelapan dana nasabah di era digital, lembaga perbankan harus memiliki strategi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk memastikan keamanan dana nasabah. Salah satu langkah utama yang dapat diambil adalah pendidikan dan literasi keuangan. Edukasi nasabah tentang risiko penipuan dan cara melindungi informasi pribadi mereka merupakan langkah penting. Bank dapat menyelenggarakan program pelatihan dan seminar online secara rutin, yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran nasabah akan praktik-praktik keamanan yang baik. Misalnya, nasabah dapat diberi pelatihan tentang cara mengenali email phishing, metode untuk menjaga kerahasiaan PIN dan kata sandi, serta pentingnya tidak mengklik tautan mencurigakan. Program edukasi ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan nasabah tetapi juga membangun kepercayaan antara bank dan nasabah. Selain itu, bank juga harus menyediakan informasi yang transparan dan mudah dipahami mengenai produk dan layanan mereka. Nasabah harus mendapatkan pemahaman yang jelas tentang risiko yang terkait dengan produk perbankan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih aman. Informasi yang komprehensif dan transparan ini akan membantu nasabah merasa lebih aman dalam melakukan transaksi.<sup>11</sup>

Penggunaan teknologi keamanan juga merupakan langkah krusial yang harus diterapkan oleh bank. Teknologi keamanan yang canggih seperti firewall, sistem deteksi intrusi, dan enkripsi data adalah beberapa contoh teknologi yang dapat melindungi informasi nasabah dari akses yang tidak sah. Firewall dapat mencegah akses yang tidak sah ke sistem bank dengan memfilter lalu lintas jaringan yang mencurigakan, sementara sistem deteksi intrusi dapat mengidentifikasi dan merespons ancaman sebelum mereka menyebabkan kerusakan. Enkripsi data juga sangat penting, karena dapat memastikan bahwa data nasabah yang

---

<sup>11</sup> Novieningtyas, A. (2018). Pentingnya edukasi literasi keuangan sejak dini. UNPAR Institutional Repository. <http://hdl.handle.net/123456789/7861>

dikirimkan melalui internet tetap aman dan tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Selain itu, bank harus menerapkan autentikasi multi-faktor (MFA) untuk semua transaksi online. MFA adalah metode keamanan yang mengharuskan pengguna untuk memberikan dua atau lebih bukti identitas sebelum dapat mengakses akun mereka. Dengan menerapkan MFA, bank dapat memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses informasi sensitif atau melakukan transaksi. MFA ini dapat berupa kombinasi dari sesuatu yang nasabah tahu (seperti kata sandi), sesuatu yang mereka miliki (seperti ponsel), dan sesuatu yang mereka adalah (seperti sidik jari atau pengenalan wajah). Dengan lapisan keamanan tambahan ini, bank dapat membuat lebih sulit bagi penipu untuk mengakses akun nasabah dan melakukan penggelapan dana.<sup>12</sup>

Regulasi dan penegakan hukum juga memainkan peran penting dalam melindungi dana nasabah. Bank harus bekerja sama dengan otoritas pemerintah dan penegak hukum untuk memastikan bahwa ada regulasi yang ketat terkait perlindungan dana nasabah. Kerja sama ini dapat mencakup berbagai hal, mulai dari berbagi informasi tentang ancaman keamanan hingga berkolaborasi dalam penyelidikan kasus penipuan. Bank juga harus mematuhi regulasi yang berlaku, seperti undang-undang perlindungan data pribadi dan regulasi perbankan, untuk memastikan bahwa mereka melindungi informasi nasabah dengan benar. Selain itu, bank harus melakukan audit internal secara rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan yang telah ditetapkan. Audit ini dapat mendeteksi potensi penyalahgunaan oleh karyawan bank dan memastikan bahwa semua prosedur keamanan diikuti dengan ketat. Audit rutin ini juga dapat membantu bank dalam mengidentifikasi kelemahan dalam sistem keamanan mereka dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaikinya sebelum terjadi insiden.<sup>13</sup>

Tindakan proaktif dan responsif juga sangat penting dalam mencegah penggelapan dana. Bank harus membangun sistem pelaporan penipuan yang mudah diakses bagi nasabah untuk melaporkan aktivitas mencurigakan atau penipuan. Saluran pelaporan ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan nasabah untuk melaporkan tanpa rasa takut atau kesulitan. Misalnya, bank dapat menyediakan aplikasi mobile yang memungkinkan nasabah melaporkan penipuan secara cepat dan anonim. Selain itu, bank harus menyiapkan tim respons insiden yang terlatih untuk menangani kasus penggelapan dana dengan cepat dan efisien. Tim ini harus mampu merespons dengan cepat terhadap insiden dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak bagi nasabah. Tim respons insiden ini harus dilengkapi dengan alat dan teknologi yang diperlukan untuk melakukan investigasi mendalam dan mengambil tindakan korektif dengan segera. Dengan respons yang cepat dan efisien, bank dapat meminimalkan kerugian yang dialami oleh nasabah dan memastikan bahwa kepercayaan mereka terhadap bank tetap terjaga.

Selain itu, kolaborasi antara sektor publik dan swasta sangat penting dalam menciptakan sistem keamanan yang efektif untuk melawan kejahatan perbankan di era digital ini. Bank dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah, penyedia teknologi, dan organisasi lainnya untuk berbagi informasi tentang ancaman keamanan dan praktik terbaik dalam melindungi dana nasabah. Dengan kerja sama yang baik, bank dan otoritas terkait dapat membangun ekosistem yang lebih aman bagi semua pihak yang terlibat. Kolaborasi ini juga dapat mencakup partisipasi dalam forum keamanan siber dan kelompok kerja industri yang bertujuan untuk mengembangkan standar dan pedoman keamanan yang efektif.

---

<sup>12</sup> Santoso, T. I., Arintonang, S., & Febriani, E. (2024). *National security: Melindungi negara di era digital*. CV. Aksara Global Akademia.

<sup>13</sup> Salmon, H. C. J., & Baljanan, G. M. (2024). Penggelapan dana nasabah sebagai bentuk tindak pidana korupsi di Indonesia. *Sanisa: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1). Retrieved from <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sanisa/article/view/2172>

Dengan demikian, penerapan langkah-langkah pencegahan yang komprehensif dan berkelanjutan akan menjadi kunci keberhasilan bank dalam menjaga keamanan dana nasabah dan membangun kepercayaan yang kuat di era digital ini. Langkah-langkah seperti pendidikan dan literasi keuangan, penggunaan teknologi keamanan canggih, kepatuhan terhadap regulasi, tindakan proaktif dan responsif, serta kolaborasi yang erat dengan pihak terkait akan membantu bank menciptakan lingkungan keuangan yang lebih aman dan terpercaya bagi nasabah mereka.

Upaya ini tidak hanya akan melindungi dana nasabah tetapi juga akan memperkuat reputasi bank sebagai lembaga yang dapat dipercaya dalam menyediakan layanan keuangan di era digital. Dengan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, bank dapat menghadapi tantangan keamanan yang terus berkembang dan memastikan bahwa mereka tetap menjadi pilihan utama bagi nasabah dalam memenuhi kebutuhan keuangan mereka.

#### B. Proses Penanganan Hukum Terhadap Pelaku Penggelapan Dana Nasabah Di Indonesia

Penanganan hukum terhadap pelaku penggelapan dana nasabah di Indonesia merupakan isu yang krusial, mengingat dampaknya yang luas terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan dan keamanan dana nasabah. Dalam konteks hukum yang berlaku di Indonesia, diperlukan proses hukum yang efektif, akuntabel, dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku dengan tujuan utama menegakkan keadilan. Proses penanganan hukum terhadap pelaku penggelapan dana nasabah umumnya melibatkan beberapa tahapan, yaitu investigasi mendalam oleh pihak berwenang, penuntutan hukum yang dilakukan dengan landasan bukti yang kuat, serta pemberian sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Tahapan-tahapan ini memerlukan koordinasi yang cermat antara lembaga penegak hukum, lembaga keuangan, serta pihak terkait lainnya guna mencapai hasil yang diharapkan.

##### a. Tahap Investigasi Kasus Penggelapan Dana Nasabah

Langkah awal yang dilakukan dalam penanganan kasus penggelapan dana nasabah adalah melalui investigasi yang komprehensif, yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian atau kejaksaan. Investigasi ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup guna menguatkan dugaan atau tuduhan terhadap pelaku penggelapan. Proses investigasi umumnya terdiri dari beberapa kegiatan penting, yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa semua unsur kejahatan penggelapan dapat dibuktikan dengan akurat.<sup>14</sup>

Pertama-tama, dalam hal ini lembaga keuangan yang mengalami penggelapan dana akan melakukan audit internal. Audit ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi transaksi-transaksi yang mencurigakan atau tidak lazim. Hal ini sangat penting, mengingat banyak kasus penggelapan dana dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki akses langsung terhadap sistem atau data perbankan, seperti pegawai bank atau bahkan manajemen senior. Dengan adanya audit internal, transaksi-transaksi yang dianggap tidak biasa dapat ditandai dan kemudian dianalisis lebih lanjut untuk mencari bukti yang relevan.

Langkah kedua dalam investigasi adalah mengumpulkan bukti-bukti digital. Di era digital seperti saat ini, bukti digital sering kali menjadi kunci dalam mengungkap kasus penggelapan dana, karena jejak digital dapat digunakan untuk melacak asal-usul dana, penerima, dan mekanisme transfer dana tersebut. Dalam hal ini, teknologi berperan besar dalam membantu penegak hukum untuk menelusuri transaksi keuangan, serta mengidentifikasi perangkat elektronik yang digunakan oleh pelaku, seperti komputer atau telepon seluler. Bukti digital ini sangat berharga dalam investigasi karena sering kali berisi jejak yang sangat sulit untuk dihapus.

---

<sup>14</sup> Pontoh, A. (2018). Pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana pembobolan rekening nasabah bank. *Lex Administratum*

Selanjutnya, kerjasama antar lembaga menjadi aspek yang sangat penting dalam investigasi kasus penggelapan dana nasabah. Kerjasama ini melibatkan koordinasi antara berbagai pihak, baik dari pemerintah seperti kepolisian dan kejaksaan, maupun lembaga swasta seperti bank dan penyedia layanan keuangan lainnya. Kolaborasi ini sangat penting karena dapat mempercepat proses investigasi dan memungkinkan penyelidikan yang lebih mendalam serta komprehensif, sehingga semua bukti yang relevan dapat dikumpulkan dengan lebih efektif dan efisien.

## 2. Tahap Penuntutan Terhadap Pelaku Penggelapan Dana Nasabah

Setelah bukti-bukti yang diperlukan terkumpul, proses hukum berlanjut ke tahap penuntutan terhadap pelaku penggelapan dana nasabah. Dalam konteks hukum di Indonesia, penuntutan terhadap pelaku penggelapan dana nasabah dilakukan berdasarkan beberapa dasar hukum yang relevan. Salah satu dasar hukum utama adalah Undang-Undang Perbankan.

Undang-Undang Perbankan, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menjadi dasar hukum yang penting dalam kasus-kasus penggelapan dana nasabah. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dapat dikenakan sanksi pidana yang berat. Dalam proses penuntutan berdasarkan undang-undang ini, jaksa harus memiliki bukti yang kuat untuk menunjukkan bahwa tindakan pelaku melanggar ketentuan perbankan yang berlaku.<sup>15</sup>

Selain Undang-Undang Perbankan, hukum pidana umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga dapat dijadikan landasan dalam menuntut pelaku penggelapan dana nasabah. Dalam KUHP, tindakan penggelapan diatur dalam pasal-pasal terkait dengan pencurian atau penggelapan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) memiliki tanggung jawab untuk membawa kasus ini ke pengadilan dan meyakinkan hakim bahwa bukti-bukti yang telah dikumpulkan membuktikan kesalahan pelaku. Penuntutan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, serta untuk memberikan keadilan bagi korban yang mengalami kerugian.

## 3. Tahap Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Penggelapan Dana Nasabah

Jika pengadilan akhirnya memutuskan bahwa pelaku terbukti bersalah, maka pengadilan akan memberikan sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Sanksi yang diberikan dalam kasus penggelapan dana nasabah biasanya mencakup hukuman pidana, pembayaran ganti rugi kepada korban, dan sanksi administratif terhadap lembaga keuangan yang lalai.

Hukuman penjara menjadi salah satu bentuk sanksi yang paling umum diterapkan terhadap pelaku penggelapan dana nasabah. Hukuman ini diberikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak kejahatan serupa di masa depan.

Selain hukuman penjara, pelaku penggelapan dana nasabah juga dapat diwajibkan membayar ganti rugi kepada nasabah yang mengalami kerugian. Pembayaran ganti rugi ini bertujuan untuk mengembalikan dana nasabah yang digelapkan oleh pelaku, serta memberikan keadilan kepada nasabah yang telah dirugikan. Hal ini diharapkan dapat memulihkan sebagian besar kerugian yang dialami oleh korban dan meningkatkan rasa keadilan dalam proses penanganan hukum.

Sanksi administratif dapat diberikan kepada lembaga keuangan yang terbukti lalai dalam menjaga keamanan dana nasabah. Lembaga yang lalai dapat dikenakan sanksi administratif seperti denda atau bahkan pencabutan izin usaha, sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga keuangan. Sanksi ini juga bertujuan untuk mendorong lembaga-

---

<sup>15</sup> Haykal, H. (2012). Vicarious liability atas tindak pidana penggelapan dana nasabah dalam praktik perbankan. *Psychology*.

lembaga keuangan agar menerapkan sistem keamanan yang lebih baik dan mampu melindungi dana nasabah secara lebih efektif.<sup>16</sup>

#### 4. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah

Selain penindakan terhadap pelaku, perlindungan hukum bagi nasabah juga merupakan aspek yang tidak kalah penting dalam penanganan kasus penggelapan dana. Nasabah memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai hak-hak mereka serta prosedur yang harus ditempuh jika mereka mengalami kerugian akibat penggelapan dana. Lembaga keuangan harus menyediakan jalur komunikasi yang transparan dan jelas bagi nasabah untuk melaporkan kasus penggelapan, serta memberikan edukasi tentang cara melindungi diri dari risiko kejahatan keuangan.

Secara keseluruhan, melalui penerapan langkah-langkah ini, diharapkan proses penanganan hukum terhadap pelaku penggelapan dana nasabah di Indonesia menjadi lebih efektif dan memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam bertransaksi secara digital. Penanganan yang komprehensif tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan serupa di masa yang akan datang dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan di Indonesia<sup>17</sup>

## PENUTUP

Sebagai penutup, artikel ini menyoroti tantangan besar yang dihadapi sektor perbankan dalam era digital, terutama terkait dengan penggelapan dana nasabah. Meningkatnya jumlah transaksi online dan ketergantungan pada teknologi membuka peluang bagi para pelaku kejahatan siber untuk mengeksploitasi celah dalam sistem keamanan bank. Penggelapan dana nasabah tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga menimbulkan dampak emosional yang mendalam bagi nasabah, yang merasa kepercayaan mereka terhadap lembaga keuangan terganggu. Kasus ini dapat merusak reputasi bank, mengurangi kepercayaan publik, serta memicu nasabah untuk mencari alternatif lain yang dianggap lebih aman.

Untuk mengatasi masalah ini, pendekatan yang komprehensif sangat diperlukan. Pertama, lembaga keuangan harus meningkatkan sistem keamanan digital mereka dengan memanfaatkan teknologi canggih, seperti enkripsi data, firewall, dan sistem deteksi intrusi. Selain itu, bank juga harus melibatkan teknologi autentikasi multi-faktor untuk mengurangi risiko akses tidak sah ke akun nasabah. Penggunaan teknologi seperti machine learning untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan juga menjadi solusi yang efektif dalam mendeteksi upaya penggelapan dana sebelum kerugian terjadi.

Di sisi lain, kolaborasi antara sektor publik dan swasta memainkan peran yang sangat penting. Pemerintah dan lembaga keuangan perlu bekerja sama dalam memperkuat regulasi terkait perlindungan nasabah serta memperketat penegakan hukum terhadap pelaku penggelapan. Regulasi yang lebih ketat akan memberikan dasar hukum yang kuat bagi upaya penegakan hukum, sementara kerja sama lintas lembaga dapat mempercepat investigasi dan penuntutan kasus penggelapan. Hal ini juga termasuk upaya untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan perbankan digital yang kompleks.

Tidak hanya itu, literasi keuangan dan digital juga menjadi faktor kunci dalam mencegah penggelapan dana. Edukasi kepada nasabah tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi, menghindari situs atau email yang mencurigakan, dan menggunakan kata sandi yang kuat perlu terus dilakukan. Dengan meningkatkan literasi digital, nasabah diharapkan lebih waspada terhadap ancaman penipuan dan lebih mampu melindungi diri mereka dari berbagai

---

<sup>16</sup> Yunita, N. (2012). Analisis pertanggungjawaban pidana pelaku penggelapan uang nasabah (Studi Kasus No. 1505/pid.B/2009/PN.TK tentang Bank Tripanca). *Psychology*.

<sup>17</sup> Hayati, A. S., & Setiawan, D. A. (2023). Perlindungan hukum nasabah bank pengguna m-banking sebagai korban tindak pidana penipuan ditinjau dari hukum positif di Indonesia. *Bandung Conference Series Law*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5047>

bentuk penggelapan. Bank dapat melakukan kampanye edukasi ini secara rutin, baik melalui media sosial, aplikasi perbankan, maupun seminar online.

Selanjutnya, dalam menghadapi kasus penggelapan dana yang terjadi, lembaga keuangan perlu memiliki tim respons insiden yang tanggap dan siap menangani setiap laporan dengan cepat. Proses investigasi yang cepat dan efisien tidak hanya penting untuk menangani kasus dengan segera, tetapi juga untuk menunjukkan komitmen bank dalam melindungi dana nasabah dan menjaga kepercayaan mereka.

Secara keseluruhan, tantangan penggelapan dana di era digital memerlukan pendekatan holistik yang mencakup peningkatan teknologi keamanan, kolaborasi antar lembaga, edukasi publik, dan proses penegakan hukum yang tegas. Dengan menerapkan langkah-langkah ini secara konsisten, lembaga keuangan dapat menciptakan lingkungan perbankan yang lebih aman dan terpercaya, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Hal ini tidak hanya melindungi kepentingan nasabah, tetapi juga menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan di Indonesia di tengah perkembangan teknologi yang pesat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, S. (2012). Analisis isi pemberitaan kasus tindak kejahatan perbankan (Studi analisis isi berita kasus penggelapan dana nasabah Citibank periode Maret 2011-Maret 2012 di Metro TV). *Engineering*. Corpus ID: 107706738
- Guna, I. G. A. W., Sukandia, I. N., & Ujianti, N. M. P. (2022). Pertanggungjawaban pidana pengurus LPD yang melakukan penggelapan dana nasabah di LPD Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), 227-233. <https://doi.org/10.55637/jkh.3.2.4803.227-233>
- Hanae, A., Gahi, Y., & El Mendili, S. (2023). Analysis of banking fraud detection methods through machine learning strategies in the era of digital transactions. *Colloquium in Information Science*. <https://doi.org/10.1109/CiSt56084.2023.10409974>
- Hayati, A. S., & Setiawan, D. A. (2023). Perlindungan hukum nasabah bank pengguna m-banking sebagai korban tindak pidana penipuan ditinjau dari hukum positif di Indonesia. *Bandung Conference Series Law*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5047>
- Haykal, H. (2012). Vicarious liability atas tindak pidana penggelapan dana nasabah dalam praktik perbankan. *Psychology*.
- Johri, A., & Kumar, S. (2023). Exploring customer awareness towards their cyber security in the Kingdom of Saudi Arabia: A study in the era of banking digital transformation. *Human Behavior and Emerging Technologies*. <https://doi.org/10.1155/2023/2103442>
- Lestari, R. (2020). Analysis of quality of management accounting information system to improve the implementation of good corporate governance principles (Case of Sharia commercial banks in Bandung City). *Research Journal of Finance and Accounting*, 11(6), 10. <https://doi.org/10.7176/rjfa/11-6-10>
- Novieningtyas, A. (2018). Pentingnya edukasi literasi keuangan sejak dini. UNPAR Institutional Repository. <http://hdl.handle.net/123456789/7861>
- Ochilov, K. (2021). The object and its significance in crimes of looting other's property by using computer tools. *Psychology and Education*, 58(1), 855. <https://doi.org/10.17762/PAE.V58I1.855>
- Pontoh, A. (2018). Pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana pembobolan rekening nasabah bank. *Lex Administratum*.
- Reddy, N. M., & Karthik, N. (2024). A study of recent Indian banking sector issues and challenges in the digital era. *International Journal of Economics, Business, and Computer Science*. <https://doi.org/10.55248/gengpi.5.0824.2002>

- Sahrir, I. F., Paridah, N., Yunitasari, K., & Putri, R. A. A. (2024). Perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam penggunaan aplikasi Dana di Indonesia. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)*, 2(2). <https://doi.org/10.59435/jurdikum.v2i2.379>
- Salmon, H. C. J., & Baljanan, G. M. (2024). Penggelapan dana nasabah sebagai bentuk tindak pidana korupsi di Indonesia. *Sanisa: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1). Retrieved from <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sanisa/article/view/2172>
- Santoso, T. I., Aritonang, S., & Febriani, E. (2024). National security: Melindungi negara di era digital. CV. Aksara Global Akademia.
- Yudhistira, F., Faniyah, I., & Fahmiron, F. (2022). Penyidikan tindak pidana perbankan dalam bentuk penggelapan dana nasabah kredit usaha rakyat pada PT. BRI Cabang Katib Sulaiman. *Unes Journal of Swara Justisia*, 5(4). <https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i4.235>
- Yunita, N. (2012). Analisis pertanggungjawaban pidana pelaku penggelapan uang nasabah (Studi Kasus No. 1505/pid.B/2009/PN.TK tentang Bank Tripanca). *Psychology*.